

SKRIPSI

**POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA DESA
DI DESA MAGGENRANG KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**



Oleh :

ANDI AHMAR IHWAL IKHSAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101818

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL

**POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA DESA
DI DESA MAGGENRANG KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI AHMAR IHWAL IKHSAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101818

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa
di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu
Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Andi Ahmar Ihwal Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101818
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



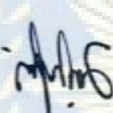
HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0161/FSP/A.4-II/VI/44/2023 Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Makassar Pada Hari Kamis, 20 Juli 2023.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Andi Lukur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

Tim Penguji:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
3. Hamrun, S.IP., M.Si

 ()
 ()
 ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi ahmar ihwal ikhsan

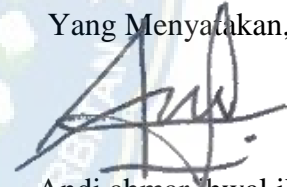
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101818

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumberlain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Andi ahmar ihwal ikhsan

ABSTRAK

Andi Ahmar Ihwal Ikhsan, 2023. Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Pola jaringan politik dinasti merupakan serangkaian politik manusia untuk memperoleh kekuasaan tetapi berada pada pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dimiliki kepada orang lain yang memiliki ikatan kekuasaan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola terbentuknya jaringan politik dinasti dan dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku politik masyarakat Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola terbentuknya jaringan politik dinasti dan dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumenter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola jaringan politik dinasti kepala desa di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone meliputi 1) Modal Ekonomi: Kepala Desa Maggenrang memiliki modal ekonomi yang stabil, namun memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa sebelumnya sehingga tergolong dalam politik dinasti, 2) Modal Kultural: Karakter dan kompetensi Kepala Desa Maggenrang jauh lebih penting sebab berdampak pada proses pengambilan keputusan dan tolok ukur dalam bertindak, 3) Modal Sosial: Kepala Desa Maggenrang memiliki modal sosial yang baik, nampak pada peran beliau dalam membuat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dan 4) Modal Simbolik: Kepala Desa Maggenrang memiliki modal simbolik yang tergolong kurang tetapi beliau mampu mensejahterakan rakyatnya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik di Desa Maggenrang yakni pembatasan kesempatan bagi orang lain yang lebih layak untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Maggenrang.

Kata Kunci : Jaringan, dinasti, politik, keluarga, kepala desa

ABSTRACT

Andi Ahmar Ihwal Ikhsan, 2023. *The Political Network Pattern of the Dynasty of Village Heads in Maggenrang Village Kahu District Bone Regency.*

The dynastic political network pattern is a series of human politics to gain power but to be on his side by passing on the power he already has to other people who have power ties with the previous power holders. Based on this, this research study aims to determine the pattern of dynastic political network formation and the impact it has on the political behavior of the people of Maggenrang Village Kahu District Bone Regency.

This study uses qualitative methods to describe and explain the pattern of dynastic political network formation and the impact it has on political behavior. Data collection techniques used include observation, interviews and documentaries.

The results showed that the dynastic political network pattern of village heads in Maggenrang Village, Kahu District, Bone Regency included 1) Economic Capital: The Maggenrang Village Head had stable economic capital, but had a family relationship with the previous village head so that he was classified as dynastic politics, 2) Cultural Capital : The character and competence of the Maggenrang Village Head is far more important because it has an impact on the decision-making process and benchmarks for action, 3) Social Capital: The Maggenrang Village Head has good social capital, evident in his role in making and participating in community activities , and 4) Symbolic Capital: The Head of Maggenrang Village has symbolic capital which is classified as lacking but he is able to prosper his people. the impact arising from the political dynasty in Maggenrang Village is the limitation of opportunities for other people who are more suitable to occupy positions as Head of Maggenrang Village.

Keywords: Network, dynasty, politics, family, village head

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul '**pola jaringan politik dinasti kepala desa di desa maggenrang kecamatan kahu kabupaten bone** ' ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak hanya seorang Nabi dan Rosul yang telah mengepakan suatu peradaban tetapi juga merupakan sosok pejuang yang mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu bejalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal pencarian dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita adalah hal yang terindah di dunia ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **andi hamzah** dan ibunda **andi rosnawati a.sahib** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan

semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak ahmad harakan S.IP.M.HI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hamrun,S.IP.,M.SI selaku Pembimbing I, dan Bapak Hardianto Hawing,ST.,MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis
6. Teman-teman mahasiswa seperjuangan jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kelas A angkatan 2018 atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- 7.
- 8.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua oihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan Skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Juli 2023



Andi ahmar ihwal ikhsan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep	10
C. Kerangka Teori	25
D. Fokus Penelitian	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Sumber Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Teknik Pengabsahan Data.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	45

C. Pembahasan Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Konsep	25
2.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maggenrang	38



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Penetapan Judul Skripsi	68
2.	Pembimbing Penulisan Skripsi	69
3.	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	70
4.	Surat Pengantar Penelitian	71
5.	Surat Izin Penelitian dari BMPTSP Makassar	72
6.	Surat Persetujuan Melaksanakan Penelitian	73
7.	Daftar Informan	74
8.	Dokumentasi	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan bagi rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi peristiwa tersebut yakni melakukan perubahan terhadap UUD 1945 guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, peranan anggota DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, anggota-anggota DPR dipilih lewat pemilu, pengawasan terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia (HAM) memperoleh jaminan.

Demokratis merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2005. Semenjak saat itu, semua kepala daerah yang masa jabatannya selesai harus dipilih melalui proses pilkada guna menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan memberikan hak bagi rakyatnya untuk menentukan kepala daerah. Hal tersebut tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung sebab dipilih melalui DPR. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Di Indonesia, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang asing jika mengacu pada tradisi *muyawarah* untuk mencapai *mufakat*. Praktik *musyawarah-mufakat* (asas kerakyatan) di sejumlah daerah telah berlangsung berabad-abad lamanya, sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba hingga berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan sampai saat ini. Tradisi yang hidup dalam masyarakat agraris disebut juga dengan tradisi *berembuk*, bahkan sudah terlembagakan dalam bentuk yang unik seperti *kerapatan nagari*, *rembug desa*, *musyawarah subak*, dan forum-forum *musyawarah* masyarakat desa lainnya.

Seorang kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa, dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan kepala desa yakni 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan tata cara pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa bertugas melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Pesta demokrasi atau pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal (Desa). Pemilihan kepala desa juga merupakan ajang dari praktek pemilihan umum (Pemilu) guna memilih seorang calon kepala desa yang dikomandoi oleh BPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa, menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan.

Desa berasal dari berasal dari bahasa india yakni *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Eksistensi desa memiliki stuktur sosial dengan ciri masyarakat yang khas dan latar belakang adat istiadat tersendiri. Desa sebagai institusi sosial memiliki posisi yang sangat penting, otonom dan memiliki hukumnya sendiri sehingga menjadikan eksistensi desa relatif sangat mandiri dan di anggap sebagai perwujudan bangsa yang paling konkrit.

Desa pada prinsipnya mempunyai kewenangan atau kegiatan pengaturan, pembinaan, pelayanan, dan pemberian fasilitas pada masyarakat desa. Semua kewenangan yang bersangkutan dalam urusan pemerintahan ditingkat desa tersebut bersifat tugas atau bantuan dari pemerintah pusat, daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan otonomi desa. Dimensi-dimensi pemerintahan menegaskan bahwa pemerintah desa mempunyai urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya yang secara umum terdapat hubungan dan partisipatif dalam demokrasi atau disebut politik kekeluargaan.

Politik dinasti telah lama muncul di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terbentuknya ketidaksetaraan kekuasaan politik yang bisa mencerminkan ketidakaak sempurnaaan representasi demokratis dalam politik atau di sebut dengan kekuasaan melahirkann kekuatan. Dalam demokrasi yang

ideal, seharusnya rakyat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam politik, artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari tingkat regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realitasnya, masyarakat masih terhalang oleh status ataupun hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena politik dinasti.

Demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang di jalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sedangkan politik dinasti ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Hal tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra, ada yang beranggapan bahwa politik dinasti ini baik karena kestabilan politik terjaga tetapi ada pula yang beranggapan bahwa politik dinasti ini hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk memperpanjang masa jabatan atau kekuasaannya. Selain itu dapat mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan sebab biasanya calon pemimpin politik dinasti lebih banyak sokongan.

Undang-Usndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Politik dinasti bersebrangan dengan demokrasi. Namun, walaupun sudah era demokrasi tetapi politik dinasti tetap berlaku meskipun sudah ada partai politik atau pemilihaan langsung.

Istilah “politik dinasti” mengacu pada praktek politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah “dinasti” juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik”

dalam studi lain. Pada umumnya, kata “dinasti” berarti keluarga/kelompok atau suku”. Dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, dinasti berarti anak. Sedangkan kata “dinasti” lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai suatu kelompok sosial.

Politik dinasti merupakan serangkaian politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tetapi berada pada pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dimiliki kepada orang lain yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Terbentuknya politik dinasti disuatu daerah seharusnya dihilangkan sebab politik dinasti merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada sistem politik yang ada, terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya.

Jika politik dinasti telah dipersiapkan dengan baik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan maka tidak akan menjadi masalah dan justru memberikan suatu ruang tertentu kepada orang lain untuk bergabung. Namun, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga dan tak memiliki kompetensi maka akan menjadi kesalahan besar. Pada realita saat ini, politik klan bukannya dihilangkan malah melahirkan politik dinasti yang kian bertambah di suatu daerah sehingga terkadang tidak ada ruang bagi orang lain untuk bergabung dalam pemerintahan seperti yang terjadi di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Dinamika pola jaringan politik dinasti yang terjadi di Desa Maggenrang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Telah hampir 20 tahun roda pemerintahan Kepala Desa Maggenrang di pimpin oleh keluarga yang sama dan diteruskan secara turun temurun kegenerasinya. Selain itu, pemilihan aparat desa juga dilaksanakan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Terdapat 3 dusun yang masyarakatnya memiliki pertalian darah dengan Kepala Desa Maggenrang, yaitu Dusun Lamentung, Dusun Kaluppang, dan Dusun Petungnge. Kepala Desa Maggenrang memberi andil yang besar terhadap dinamika politik di Desa Maggenrang sehingga terbentuk politik kekeluargaan atau politik dinasti dan tidak adanya oposisi sehingga Desa Maggenrang tidak ada kemajuan di bidang ekonomi.

Berdasarkan pada fakta yang telah diperoleh sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa Di Desa Maggenrang di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi pola terbentuknya jaringan politik dinasti Kepala Desa di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan jaringan politik dinasti kepala desa terhadap perilaku politik masyarakat di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola terbentuknya jaringan politik dinasti Kepala Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jaringan politik dinasti kepala desa terhadap perilaku politik masyarakat Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi jurusan ilmu pemerintahan terkait pola jaringan politik dinasti kepala Desa.
 - b. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana Politik dinasti dalam kepemimpinan desa terkait pola jaringan politik Dinasti Kepala Desa.
2. Praktis
 - a. Untuk memberikan informasi tentang faktor terbentuknya jaringan politik di Desa Maggenrang serta dampak yang di timbulkan terhadap perilaku politik masyarakat.

- b. Bagi pembaca, menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pola jaringan politik dinasti kepala desa.
- c. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan.
- d. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran beberapa referensi, berikut penjabaran beberapa penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian peneliti.

1. Suyadi. 2020. *Bentuk dan Karakter Politik kekerabatan di Indonesia*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokalitas budaya dalam setiap daerah merupakan hal yang mempengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti yang berlangsung di suatu wilayah tertentu.

2. Susi Asninda. 2018. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kepala desa di Desa muara kuis dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan iklim desa yang partisipatis, merubah persepsi masyarakat dan membuat program yang melibatkan masyarakat.

3. M.Iqbal Pajri. 2020. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan belum optimal,

kendala yang di temukan terletak pada lemahnya fungsi pengawasan. Hal demikian disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang menduduki jabatan BPD tersebut. Dimana pada umumnya mereka tidak memahami tugas dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam UUD No. 6 Tahun 2014. BPD juga mendapatkan kendala di pengawasan kepala desa yang masih memakai rasa kekeluargaan, dimana hal seperti ini tidak boleh terjadi di dalam birokrasi pemerintah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terletak pada kekuatan kepala desa Maggenrang sebelumnya. Hubungan kekeluargaan yang erat antara kepala desa sebelumnya dengan kepala desa yang sekarang menyebabkan pembatasan kesempatan kepada orang lain untuk menduduki jabatan yang sama. Meskipun hal demikian menyalahi aturan yang berlaku tetapi realita tersebut masih berlangsung di Desa Maggerang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Praktik nepotisme tentu merugikan banyak pihak sebab proses pemilihan kepala desa tidak berlangsung secara adil dan tidak berdasarkan keahlian serta kompetensi orang yang akan menduduki jabatan tersebut. Praktik nepotisme merupakan tindakan yang dapat berdampak pada korupsi dan kolusi.

B. Teori dan Konsep

Kata teori berasal dari bahasa Yunani yang berarti melihat atau memperhatikan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Miriam Budiaorjo mengungkapkan bahwa teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa

fenomena. Sedangkan generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Pada penyusunan generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep.

1. Politik Dinasti

Penggunaan politik dinasti dalam studi ini bermaksud untuk memaparkan politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah dinasti juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah oligarki politik dalam studi yang lain. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, belum banyak studi yang menjelaskan pengertian politik dinasti secara spesifik. Hal ini disebabkan oleh arti dari dinasti itu sendiri yang umumnya berarti keluarga atau kelompok. Dinasti di gambarkan sebagai suku, yang dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia yakni klan berarti anak. Sementara itu, istilah klan lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai analisis sistem kekeluargaan yang didefinisikan sebagai suatu kelompok sosial yang permanen berdasarkan keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama.

Para antropolog menggunakannya sebagai analisis dalam studi masyarakat primitif. Namun, istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan masyarakat modern. Misalnya penggunaan istilah klan di negara pasca Soviet, cukup umum untuk berbicara tentang klan mengacu pada jaringan informal dalam bidang ekonomi dan politik. Penggunaan ini atas asumsi bahwa anggota mereka bertindak terhadap satu sama lain dalam cara yang sangat dekat dan saling mendukung kurang lebih sama dengan solidaritas di dalam keluarga.

Politik dinasti lebih mengacu kepada konsep politik kekeluargaan. Di Amerika, politik kekeluargaan mengacu kepada konsep *political family*. Menurut Kurtz (2011), bahwa *political family* terjadi apabila minimal dua orang yang mempunyai ikatan kekerabatan menduduki jabatan politik *political family exist when two or more relatives hold or have held public office*. Istilah lain dari *political family* adalah *political kinship*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Casey (2009), bahwa *Political kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a consanguineous connection within two generations from the candidate*. Artinya keanggotaan kekerabatan politik atau keluarga politik didefinisikan sebagai ikatan hubungan darah ataupun hubungan pernikahan dalam dua generasi dari kandidat).

Sejalan dengan Stephen Hess (2012) menyebut, bahwa *political dynasty as any family that has had at least four members, in the same name, elected to federal office*. Artinya politik dinasti adalah suatu keluarga yang mempunyai minimal empat anggota keluarga, terpilih dalam jabatan politik. Para akademisi lebih banyak menggunakan istilah-istilah ini untuk menjelaskan bagaimana politik dalam lingkaran keluarga. Kamus *oxford, advanced learner's dictionary* mendefinisikan bahwa *dynasty* sebagai sebagai “*a period of years during which members of a particular* sebagai suatu periode tahun di mana anggota keluarga tertentu memerintah suatu Negara. Singkatnya bahwa dinasti adalah bagian dari kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga dalam struktur sosial dan politik lalu kemudian berlanjut secara turun temurun.

Terdapat kerancuan dalam konsep yang dikemukakan oleh Casey, dimana beliau mendefinisikan keluarga politik terjadi apabila terdapat dua anggota keluarga dalam kandidat politik. Sementara di sisi yang lain, Casey memasukkan

dinasti sebagai salah satu bentuk politik kekerabatan yang mengacu kepada pendapat Hess bahwa dinasti terbentuk apabila terdapat paling tidak 4 anggota keluarga menduduki jabatan politik.

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar masyarakat yang membangun relasi baik relasi ekonomi politik maupun sosial budaya dipandang dari sudut wilayah tempat tinggal yang digolongkan dalam dua kelompok yakni masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan atau klan keluarga. Anak-anak setelah menikah akan membuat rumah tempat tinggal dilahan milik keluarga atau orang tuanya yang tentu berdekatan dalam satu komunitas. Interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentiment komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan.

Komunitas masyarakat desa dan kelompok masyarakat kota dalam hubungan interaksi sosialnya di gambarkan oleh F. Tonnies dengan istilah *gemeinschaft* untuk masyarakat desa dan *gesellschaft* untuk masyarakat kota. Dalam istilah yang lain kedua model masyarakat tersebut yang oleh Emile Durkheim di sebut sebagai solidaritas mekanik untuk masyarakat desa dan solidar organik untuk masyarakat kota.

Hal lain juga mempengaruhi refreduksi kuasa klan dalam sistem kepartaian dan pemilu. Mengacu pada partai golkar, Afan Gaffar menyebut bahwa istilah *hegemoni party politic* merupakan sistem kepartaian yang ada pada rezim orde baru partai golkar. Suryadinata mengungkapkan bahwa pada saat itu merupakan

the ruling party yang menggunakan strategi untuk memenangkan seluruh rangkaian pemilu dengan berubah menjadi “Partai Negara”, secara de facto terdiri dari komponen birokrasi dan militer tetapi gelombang reformasi sedikit banyak telah menghilangkan sistem kepartaian hegemonik tersebut.

2. Teori Kapital (Modal)

Bourdieu (1926) mengungkapkan bahwa modal berperan sebagai suatu relasi sosial yang terdapat dalam suatu sistem pertukaran dan pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam suatu formasi sosial tertentu. Modal harus ada dalam suatu ranah guna memiliki arti.

Keterkaitan antara ranah, habitus, dan modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikisari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal dalam ranah-ranah tertentu dan digabungkan ke dalam habitus sebagian dihasilkan oleh basis material tersebut. Lazimnya, jumlah (volume) modal, sebagaimana struktur modal tambahan juga merupakan suatu dimensi penting di dalam ranah. Menurut Bourdieu (1926), bahwa terdapat beberapa modal dalam mendapatkan kekuasaan antara lain :

1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi adalah sumber daya yang dapat menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modal ekonomi mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda- benda),

dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal ekonomi merupakan modal yang paling mudah dan dapat langsung ditukar dengan uang serta dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua macam modal ekonomi, yaitu uang yang berhubungan dengan media pertukaran dan hak kepemilikan yang berhubungan dengan barang modal fisik. Uang bukan modal dalam arti sebenarnya tetapi uang hanya merupakan sarana untuk dapat mengembangkan modal fisik dan modal manusia.

Modal ekonomi adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi (misalnya pabrik, mesin, alat,) serta dikumpulkan atau ditabung untuk investasi masa depan. Modal ekonomi memiliki makna sebagai “penggerak” dan “pelumas” dalam mesin politik. Pada musim kampanye misalnya, kandidat membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhannya seperti biaya poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Seorang kandidat juga memerlukan dukungan ekonomi dari aktor-aktor ekonomi untuk pemenangan pilkada dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan politik. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa proses politik pilkada membutuhkan biaya atau ongkos yang sangat mahal. Hal demikian menyebabkan munculnya tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal sebab kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang atau modal yang besar.

2. Modal Kultural

Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti pengetahuan, keahlian, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi dan sebagainya. Bourdieu (1926) mengungkapkan bahwa modal kultural merupakan representasi bentuk paling efektif dalam transmisi modal kultural yang dapat dilihat melalui warisan karena sebagian besar hal tersebut tersembunyi dan dengan demikian kurang siap dikendalikan.

Terkait pendapat Bourdieu (1926), implementasi modal kultural dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut

- 1) *Embodied state* adalah bentuk fisik dari suatu kultur yang melekat pada tubuh manusia dan secara keseluruhan menyatu dengan manusia sebagai satu kesatuan. Bentuk dari *embodied state* dapat berupa pola hidup, cara berbicara, cara berbusana dan kecenderungan-kecenderungan lain yang melekat pada individu sebagai pelaku sosial. Bentuk kultural semacam ini dapat diperoleh melalui proses yang tidak sebentar, bahkan didapatkan sejak usia anak-anak.
- 2) *Objectified state* merupakan perwujudan modal kultural dalam bentuk yang termaterikan atau juga dikatakan sebagai keadaan kultur dimana keadaan yang sudah terbentuk akan diwujudkan dalam bentuk objek nyata oleh individu. Jenis-jenis *Objectified state* dapat berupa buku-buku, instrument musik, benda seni, mesin-mesin canggih dan lain sebagainya.

3) *Institutionalized state* adalah bentuk modal kultural yang terlibat dalam ruang institusional. Gambaran dari ruang institusional dapat dilihat dari legitimasi pendidikan yang menunjukkan bahwa benda-benda kultural yang sebelumnya telah menjadi entitas yang terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk modal kultural ini diaplikasikan dalam bentuk gelar, akademik, sertifikat atau ijazah serta kualitas intelektual yang menyertainya.

3. Modal Sosial

Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual, atau maya yang terdapat pada seseorang atau kelompok karena memiliki jaringan berupa timbal balik perkenalan dan pengakuan serta sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Modal sosial atau *social capital* merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. James Coleman (2007) mengungkapkan bahwa *social capital* yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi. Sejalan dengan Robert D. Putnam (2011) mendefinisikan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipasi dalam bertindak secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Abdullah (2009) mengklasifikasikan tiga bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Ideologi dan tradisi lokal, yaitu mengacu pada pemahaman tertentu dalam menyikapi hidup dan menentukan tatanan sosial. Hal ini berupa kepercayaan

sebagai basis bagi legitimasi tindakan sosial, ajaran yang menjadi sistem acuan dalam tingkah laku, etika sosial yang mengatur hubungan antar manusia atau lingkungan, etos kerja, nilai sosial, dan norma.

- 2) Hubungan dan jaringan sosial, merupakan pola-pola hubungan antar manusia dan ikatan sosial dalam suatu masyarakat seperti kerabat atau ikatan ketetanggaan.
- 3) Jaringan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu menjangkau institusi lokal yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Hal demikian dapat berupa kelembagaan adat atau pranata sosial yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung.

Dari ketiga bentuk modal sosial yang ada, dapat disimpulkan bahwa semua bentuk modal sosial berjalan beriringan dan saling melengkapi. Konsep modal sosial merujuk pada hubungan sosial, institusi, norma sosial dan saling percaya antara orang atau kelompok lain serta mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas.

Hasbullah (2006), mengungkapkan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Pentingnya hubungan yang terjalin antar sesama manusia menjadi nilai yang ditawarkan oleh modal sosial. Memupuk hubungan yang baik dan terus terjalin dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama sebagai upaya untuk mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa terpenuhi akibat kurangnya modal pendukung. Dengan demikian, modal sosial berusaha menjabarkan proses individu dapat bekerjasama dengan individu lain.

4. Modal Simbolik

Bourdieu (1926), mengungkapkan bahwa model simbolik merupakan pengampliasian simbol-simbol tertentu untuk meligitimasi kepemilikan yang meliputi modal ekonomi, modal kultural dan modal sosial. Bourdieu juga mengatakan bahwa hubungan dan perpindahan kondisi sosial lebih kompleks daripada sekadar modal ekonomi, tetapi lebih berfungsi sebagai modal simbolik. Hal ini merupakan bentuk pengakuan atas model yang sah berdasarkan otoritas kompetensi yang diakui.

Damsar mengungkapkan bahwa model simbolik adalah model yang berwujud prestise, status, otoritas, dan kehormatan (gengsi) sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial. Untuk memperoleh modal simbolik, pelaku sosial harus mengerahkan semua bentuk dan kapasitas model yang dimiliki, baik model ekonomi maupun budaya. Selain itu, modal simbolik juga memerlukan proses sosial karena sangat tergantung pada aspek pengakuan masyarakat luas. Seseorang akan memiliki modal simbolik jika telah diakui oleh masyarakat setelah memenuhi persyaratan karakter yang sangat berharga dalam pandangan masyarakat.

3. Teori Pola Jaringan dan Perilaku Politik

a. Defenisi Pola Jaringan

Pola jaringan adalah suatu pola hubungan sosial individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk yang sifatnya kolektif. Adapun hubungan tersebut dapat berupa hubungan interpersonal yang bersifat ekonomi, politik, maupun hubungan sosial lainnya. Berikut jenis-jenis pola jaringan.

1. Jaringan kepentingan, jaringan ini terbentuk melalui hubungan-hubungan sosial yang memiliki kepentingan
2. Jaringan kekuasaan, merupakan kemampuan seseorang sebagai unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan sebagai pengambil keputusan melalui pengendalian
3. Jaringan sentimen, merupakan jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial sentimen seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, dan lain sebagainya.

b. Pendekatan dalam Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu dan idealisme seperti tingkat kecerdasan dan kehendak hati. Selain itu perilaku politik juga dipengaruhi oleh eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Ramlan Surbakti (2010), bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan kekayaan serta tindakan-tindakan nyata yang meliputi pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, dan gambaran tentang objek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Menurut Sobolim (2013), bahwa perilaku politik atau *politic behavior* adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai individu politik. Adapun pendekatan-pendekatan dalam perilaku politik, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku politik seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, hingga karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku politik. Variabel-variabel tersebut tidak dapat dihubungkan dengan perilaku politik jika terdapat proses sosialisasi. Dengan demikian, pendekatan ini merupakan sosialisasi sebenarnya yang menentukan perilaku.

3. Pendekatan Rasional

Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa memperoleh timbal balik. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih pemimpin yang sedang bertanding, maka ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini mengandaikan bahwa calon pemimpin melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan menarik simpati dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilu.

Terdapat dua catatan penting mengenai perilaku politik, yaitu 1) Perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik yang sesungguhnya merupakan suatu bagian, dan 2) Perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Dari dua catatan perilaku politik diatas, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai. Sedangkan dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan. Selain itu, dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, dan berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang pada masa mendatang.

Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, maka dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan warga negara biasa.

Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologi, di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu aktor politik merupakan kombinasi ketiga pendekatan (individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik). Menurut model ini, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sebagai berikut.

- 1) Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa

- 2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai serta norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung.
- 3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, terdapat tiga basis fungsional sikap yakni kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri.
- 4) Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

C. Kerangka Teori

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maggenrang untuk mengetahui pola jaringan politik dinasti Kepala Desa di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Realita menunjukkan bahwa terdapat permasalahan seperti terbentuknya politik klan, bukannya dihilangkan melainkan membentuk politik dinasti dan semakin bertambah di beberapa daerah sehingga tidak memberikan ruang untuk orang yang lebih mahir. Selain itu, kepala Desa Maggenrang memiliki ikatan kekeluargaan di beberapa dusun diantaranya adalah Dusun

Lamentung, Dusun Kaluppang, dan Dusun Petungnge.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi kepala desa, aparat desa, dan seluruh masyarakat Desa Maggenrang Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dalam melaksanakan politik yang baik. Berikut gambaran kerangka teori terkait penelitian ini.



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini yakni bagaimana pola jaringan politik dinasti kepala desa di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dengan menggunakan indikator modal menurut Bourdieu (1926) yang meliputi modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, dan modal sombolik.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang menjadi sarana produksi dan finansial bagi Kepala Desa Maggenrang. Modal ekonomi Kepala Desa Maggenrang berupa biaya kebutuhan kampanye dan kebutuhan masyarakat jika terdapat kegiatan yang memerlukan biaya pribadi meskipun tergolong kegiatan publik.

2. Modal Kultural

Modal kultural merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang diperoleh Kepala Desa Maggenrang melalui pendidikan formal dan warisan keluarga. Modal kultural Kepala Desa Maggenrang sebatas tamatan SMA.

3. Modal Sosial

Modal sosial merupakan investasi untuk memperoleh sumber daya baru yang terdapat pada Kepala Desa Maggenrang. Modal sosial Kepala Desa Maggenrang menjadi tekadnya untuk berani mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Maggenrang.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan bentuk pengakuan dari kelompok, baik secara institusional ataupun non- institusional. Kepala Desa Maggenrang hanya memiliki jabatan sebagai modal simbolik yang paling menonjol.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak 27 Mei sampai 27 Juli 2022 terhitung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian, peneliti melakukan pengurusan perizinan penelitian di beberapa instansi terkait. Setelah itu peneliti mulai melaksanakan observasi lapangan, kemudian melakukan proses wawancara yang dilakukan kurang lebih 2 minggu lamanya. Lalu setelah melakukan proses wawancara dengan beberapa informan, maka peneliti kemudian menyusun hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan saat proses penelitian. Setelah itu peneliti melakukan bimbingan terhadap pembimbing dalam menyusun skripsi. Maka dari itu waktu yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini kurang lebih menghabiskan waktu 2 bulan.

Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Maggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Alasan memilih Lokasi Penelitian dikarenakan peneliti mengetahui bagaimana Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone masih membudaya.

B. Jenis Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan penulis sebagaimana yang dijelaskan dalam Sugiyono (2017), sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dimulai berdasarkan lapangan dari lingkungan alami, data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, pengumpulan data dari informasi yang diperoleh, dalam perkataan yang tertulis maupun lisan dari seseorang atau pelaku yang dapat diamati dengan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah studi kasus merupakan sebuah penelitian yang mengamati tentang kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia, para peneliti mencoba untuk masuk ranah konsep substansi yang akan diteliti. Sehingga mereka akan paham seperti apa dan bagaimana pengertian yang dikembangkan oleh beberapa orang di diruang lingkup dalam kehidupan sehari-hari kemudian di deskripsikan dalam bentuk tulisan yang di kumpulkan berdasarkan kejadian yang terjadi dan objek penelitian penelitian yang berkaitan dengan Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Menurut Sugiyono (2017)

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga asli atau baru. Sumber data primer yang pertama yaitu informan, informan merupakan objek dari penelitian. Dari informan inilah, peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat dan oknum pemerintahan terkait.

Sementara itu sumber data primer yang kedua adalah informan, informan merupakan sumber berupa orang, dari beberapa informan, diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah Tokoh Masyarakat dan Element Pemerintahan terkait Penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti terdahulu.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang diminta keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana

informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1. H Nurdin	Kepala Desa	1
2. Tolleng	Kepala Dusun	1
3. Siri	Tokoh Agama	1
4. Nurul Irfan	Tokoh Pemuda	1
5. Hariadi, Masnurang, dan Karman	Tokoh Masyarakat	3

E. Sumber Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Menurut Sugiyono (2017)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga asli atau baru. Sumber data primer yang pertama yaitu informan, informan merupakan objek dari penelitian. Dari informan inilah, peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Masyarakat dan Oknum Pemerintahan terkait.

Sementara itu sumber data primer yang kedua adalah informan, informan merupakan sumber berupa orang, dari beberapa informan, diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan informan ini dipilih dari

beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah Tokoh Masyarakat dan Element Pemerintahan terkait Penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti terdahulu.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini pengumpulan data adalah tugas terpenting dalam langkah penelitian, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang penelitian ini adalah sebagai berikut menurut (Sidiq et al., 2019) :

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia menggunakan sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dalam melakukan observasi penulis mengunjungi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan terkait politik dinasti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan)

dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan itu, adapun tahapan-tahapan wawancara yaitu:

- a. Menentukan siapa yang akan diwawancarai
- b. Mempersiapkan wawancara
- c. Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif
- d. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman wawancara

3. Dokumenter

Teknik Dokumenter, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan proses terbentuknya politik klan. Teknik Dokumenter juga termasuk menelusuri data-data atau informasi secara online yang terkait dengan fenomena politik klan maupun informasi pendukung untuk melengkapi gambaran umum lokasi penelitian peneliti.

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu

analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan

diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Bone

Profil Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km dan berpenduduk 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki-laki dan 410.093 perempuan (2021).

Kabupaten Bone salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strateis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur kota Makassar, berada pada posisi 4°13'-5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur.

2. Profil Desa Maggenrang

a. Keadaan Geografis

Desa Maggenrang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dengan luas sekitar 7,71 Km². Secara geografis Desa Maggenrang merupakan dataran rendah dengan kondisi sawah dan lahannya bergantung pada air irigasi yang sebagian digunakan untuk menanam padi dan palawija bagi penduduk yang bermukim disana serta jarak lahan tidak jauh dari pemukiman penduduk.

Tingkat kepadatan penduduk Desa Maggenrang rata-rata 500 jiwa/km². Kepadatan tersebut memberikan kesan bahwa penduduk saling berdekatan rumah dan hubungan antar tetangga terjalin dengan baik pula, adapun luas wilayah Desa Maggenrang yaitu kurang lebih 1: 10 km², Desa Maggenrang memiliki sebanyak 3 Dusun, yaitu Dusun Pettunngge, Dusu Kaluppang dan Dusun Lammentung.

Untuk mencapai lingkungan-lingkungan yang berada dalam kawasan Desa Maggenrang dapat dengan mudah karena alat transportasi cukup lancar dan jalan raya yang sudah diperbaiki. Bahkan untuk sampai ke Ibukota Kecamatan Kahu pun dapat dengan mudah disebabkan oleh lancarnya alat transportasi dan jarak yang ditempuh kurang lebih 6 Menit. Yang pada umumnya kebanyakan masyarakat Desa Maggenrang ke ibu Kota Kecamatan kahu untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari.

b. Keadaan Penduduk

Penduduk yang mendiami Desa Maggenrang umumnya mempunyai rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi disebabkan oleh masih melekatnya sifat homogen hal ini dapat dilihat sebagian besar penduduknya adalah penduduk pribumi (asli) serta mereka masih satu keturunan dan masih sedikitnya pendatang dari luar daerah yang biasanya mereka hanya mengemban tugas di daerah tersebut seperti guru dan tenaga kesehatan setelah mengabdikan beberapa tahun mereka akan pulang ke daerah masing-masing.

Jumlah penduduk Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada Bulan Juni 2022 sebanyak 2.351 orang, di antaranya 1.202 Jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1.149 jiwa yang berjenis kelamin perempuan,

dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Dalam keseharian penduduk Desa Maggenrang menggunakan bahasa asli yaitu bahasa bugis. Tetapi bagi para pendatang dari luar Sulawesi juga telah fasih menggunakan bahasa bugis setelah beberapa tahun menetap di daerah tersebut.

c. Jarak Tempuh Kelurahan Palattae

Adapun orbitasi atau jarak antara Kelurahan dengan pusat pemerintahan :

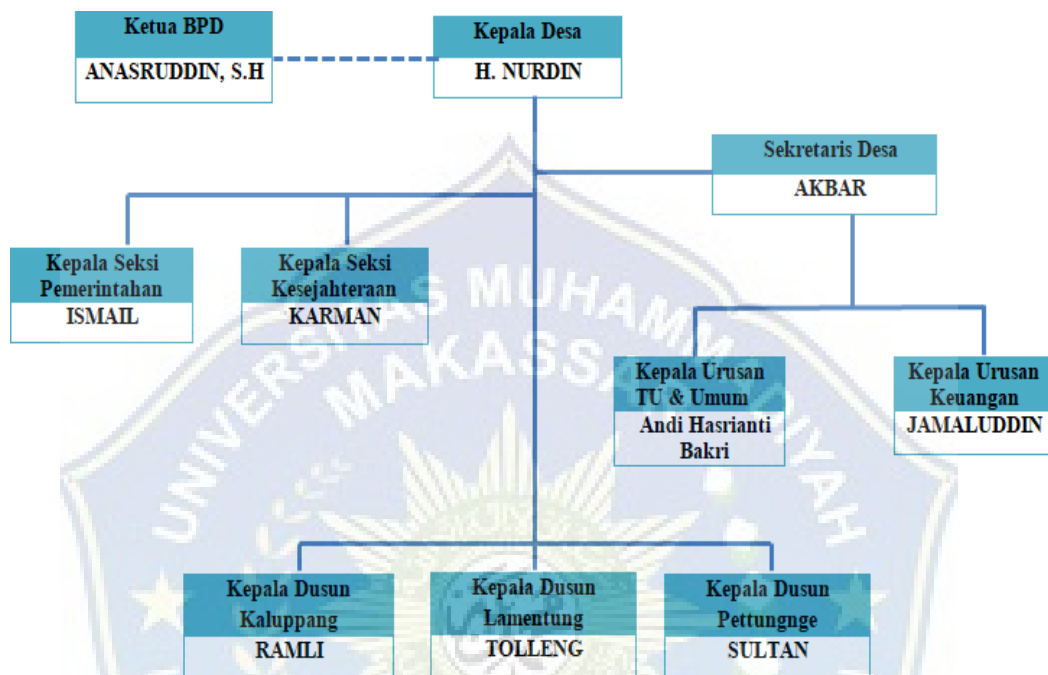
- 1) Jarak ke ibukota kecamatan yaitu 0 km dengan waktu tempuh 0 menit, hal ini karena Kelurahan Palattae merupakan ibukota Kecamatan Kahu.
- 2) Jarak ke ibukota Kabupaten yaitu kurang lebih 96 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5-3 jam (motor) dan 3-4 jam (mobil).
- 3) Jarak ke ibukota provinsi kurang lebih 105 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5-3 jam (motor) 3-4 jam (mobil).
- 4) Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) yaitu 0 menit, hal ini dikarenakan fasilitas tersebut berada dalam wilayah administratif Kelurahan Palattae.

d. Cuaca dan iklim Desa Maggenrang

Cuaca dan Iklim Desa Maggenrang beriklim subtropis dengan tanahnya yang subur karena beriklim subtropis dengan curah hujan yang tinggi yang berkisar pada bulan Juni sampai bulan Agustus, sedangkan untuk musim kemarau biasanya pada bulan Maret sampai bulan Mei. Musim pancaroba jatuh pada bulan Mei sampai bulan Juni. Sumber mata air utama yaitu memasok air dari dalam

tanah. Keadaan tanah di Desa Maggerang berupa tanah ultisol/latosol yang berwarna merah, coklat kemerahan dan coklat kekuning-kuningan.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maggerang



4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

c. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b) Menyusun RAPBDes;

- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
- 1) Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - 2) Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - 4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f) Penyiapan rapat-rapat;
 - g) Pengadministrasian aset desa;
 - h) Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i) Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j) Melaksanakan pelayanan umum.

e. Kepala Seksi Pemerintahan dan Perencanaan

- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- 2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b) Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- g. Kepala Dusun
- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa.

5. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang No. 30 pasal 55 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan Tugas Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut.

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- f. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- g. Menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala Desa antar waktu
- h. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes) bersama kepala desa
- i. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
- k. Menciptakan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga

Desa lainnya, dan melakukan tugas lain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

B. Hasil Penelitian

Politik dinasti dalam penelitian ini bermaksud untuk memaparkan politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah dinasti menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah oligarki politik. Dinasti di gambarkan sebagai suku yakni dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, klan berarti anak. Sementara itu, istilah klan lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai analisis sistem kekeluargaan yang didefinisikan sebagai suatu kelompok sosial yang permanen berdasarkan keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama.

Berikut hasil penelitian berdasarkan indikator modal menurut Bourdieu (1926).

1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang dapat menjadi sarana produksi dan finansial bagi Kepala Desa Maggenrang. Modal ekonomi adalah jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya yang mencakup alat-alat produksi, materi, dan uang. Semua jenis modal tersebut mudah digunakan untuk segala tujuan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Modal ekonomi adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi serta dikumpulkan atau ditabung untuk investasi masa depan. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Maggenrang, terkait pentingnya modal ekonomi dalam pemilihan Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Sangat penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi seorang kepala desa Maggenrang memerlukan uang, tetapi uang yang dikeluarkan tidak banyak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi seorang kepala desa sangat membutuhkan modal ekonomi walaupun memiliki modal relasi dan modal sosial.” (Wawancara, HN; 07-04-2023)

Modal ekonomi memiliki makna sebagai penggerak dan pelumas dalam mesin politik. Pada musim kampanye misalnya, kandidat Kepala Desa Maggenrang membutuhkan uang untuk membiayai berbagai kebutuhannya seperti biaya poster, spanduk, dan membayar iklan. Pernyataan dari bapak HN juga dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Maggenrang, terkait pentingnya modal ekonomi bagi seorang Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Modal ekonomi termasuk hal yang penting karena terkadang kegiatan-kegiatan masyarakat memaksa untuk menggunakan uang pribadi Kepala Desa Maggenrang meskipun termasuk kebutuhan publik.” (Wawancara, T; 08-07-2023)

Modal ekonomi merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Seorang Kepala Desa Maggenrang hendaknya memiliki modal ekonomi yang stabil sebab kegiatan-kegiatan masyarakat terkadang membutuhkan biaya yang lebih sehingga Kepala Desa Maggenrang harus tetap turut berperan dalam pelaksanaannya. Hal yang sama juga di lontarkan dalam wawancara

peneliti dengan tokoh agama Desa Maggenrang, terkait alasan pentingnya modal ekonomi bagi seorang Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Modal ekonomi penting bagi Kepala Desa Maggenrang karena ketika pemerintah mempunyai ekonomi yang buruk tentu dapat memunculkan sifat menyimpang dalam menjalankan tugasnya.” (Wawancara, S; 07-04-2023)

Modal ekonomi bagi Kepala Desa Maggenrang tergolong sangat penting sebab perilaku menyimpang dapat muncul dari rasa kekurangan. Perilaku menyimpang tersebut dapat berupa korupsi. Perilaku korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan tetapi memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pernyataan berbeda dalam wawancara peneliti dengan tokoh pemuda Desa Maggenrang, terkait modal ekonomi bagi seorang Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Modal ekonomi tidak terlalu penting karena hal yang lebih penting adalah kemampuan seorang Kepala Desa Maggenrang dalam menjalankan amanah dengan baik.” (Wawancara, NI; 09-04-2023)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maggenrang tidak mempermasalahkan modal ekonomi dari Kepala Desa Maggenrang tetapi berharap tugas dan fungsi dari Kepala Desa Maggenrang dilaksanakan dengan amanah sehingga kepercayaan masyarakat tetap dapat terjaga. Sejalan dalam wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Maggenrang, terkait modal ekonomi yang dimiliki Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa Maggenrang yang saat ini menjabat termasuk memiliki modal ekonomi yang stabil. Berbeda dengan Kepala Desa yang sebelumnya, tidak lain keluarga dari Kepala Desa yang sekarang.” (Wawancara, H; 10-04-2023)

Meskipun modal ekonomi menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan roda pemerintahan, ternyata Kepala Desa Maggenrang yang saat ini menjabat juga memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan kepala desa sebelumnya. Dengan demikian, pemerintahan Desa Maggenrang masih masuk dalam kategori politik dinasti. Keluarga politik atau politik dinasti merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Artinya, sistem pemerintahan di Desa Maggenrang masih mirip dengan pergantian pemerintahan dalam kerajaan sebab kekuasaan diwariskan kepada keluarga selanjutnya guna menjaga kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarganya.

2. Modal Kultural

Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan warisan keluarga dari seorang Kepala Desa Maggenrang, seperti pengetahuan, kompetensi, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi dan sebagainya. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Maggenrang, terkait pentingnya modal kultural bagi Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Modal kultural tergolong sangat penting bagi Kepala Desa Maggenrang. Namun hal tersebut tergantung dari pemerintah itu sendiri karena modal kultural tidak menjamin kesuksesan dalam memimpin.” (Wawancara, HN; 07-04-2023)

Modal kultural demikian disebut *intitutionalized state*, artinya modal kultural terlibat dalam ruang institusional. Gambaran ruang institusional dapat dilihat dari legitimasi pendidikan yang menunjukkan bahwa aspek-aspek kultural yang sebelumnya telah menjadi entitas terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk modal kultural ini diaplikasikan dalam bentuk gelar, akademik, sertifikat atau ijazah serta kualitas intelektual yang menyertainya. Pernyataan diatas juga dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Maggenrang, terkait modal kultural yang dimiliki Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa Maggenrang yang saat ini menjabat kurang memiliki modal kultural karena beliau hanya lulusan SMA. Namun, beliau mampu memimpin Desa Maggenrang selangkah lebih baik.” (Wawancara, T; 08-04-2023)

Kesuksesan seorang Kepala Desa Maggenrang tergantung dari personal pemerintah itu sendiri. Meskipun pemerintah memiliki pendidikan yang tinggi dan wawasan yang hebat tetapi tidak manfaatkannya dengan baik maka hal demikian akan sia-sia. Sebaliknya, jika seorang pemimpin hanya memiliki pendidikan yang rendah dan wawasan yang terbatas tetapi memanfaatkan jabatannya dengan bijak dan membunmi maka semua masyarakat akan mengseganinya. Demikian dengan Kepala Desa Maggenrang, meskipun beliau hanya lulusan SMA tetapi beliau dianggap mampu memimpin Desa Maggenrang dengan sangat baik. Hal senada juga diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh agama Desa Maggenrang, terkait modal kultural terbatas atau rendah yang dimiliki Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Bukan suatu masalah. Sejauh ini Kepala Desa Maggenrang telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan masyarakat Desa Maggenrang sehingga sangat dihormati. Hal demikian cukup menjadi bukti bahwa riwayat pendidikan bukan jaminan kesuksesan seseorang.” (Wawancara, S; 07-04-2023)

Kepala Desa Maggenrang dianggap telah memberikan kemajuan bagi masyarakat. Kepala Desa Maggenrang di pandang memiliki pola kepemimpinan yang bijak dan berkhariisma. Selain itu, Kepala Desa Maggenrang juga di pandang berwibawa sehingga dihormati dan penuh daya tarik. Sejalan dalam wawancara peneliti dengan tokoh pemuda Desa Maggenrang, terkait pengaruh modal kultural yang dimiliki dengan kepemimpinan Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Tidak berpengaruh. Meskipun modal kultural termasuk hal yang penting tetapi yang terpenting adalah kemampuan Kepala Desa Maggenrang dalam mensejahterakan rakyatnya.” (Wawancara, NI; 09-04-2023)

Modal kultur Kepala Desa Maggenrang masuk dalam kategori *embodied state*. Modal kultur *embodied state* adalah bentuk fisik dari suatu kultur yang melekat pada tubuh manusia dan secara keseluruhan menyatu dengan manusia sebagai satu kesatuan. Bentuk dari *embodied state* dapat berupa pola hidup, cara berbicara, cara berbusana dan kecenderungan-kecenderungan lain yang melekat pada individu sebagai pelaku sosial. Pernyataan yang sama juga dilontarkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Maggenrang, terkait pencapaian harapan masyarakat dengan modal kultural yang dimiliki Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Sudah sesuai harapan. Buktinya Kepala Desa Maggenrang mampu memimpin Desa Maggenrang dengan karakter serta kompetensi yang di milikinya, beliau bahkan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tindakan. (Wawancara, M; 10-04-2023)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Kepala Desa Maggenrang telah memimpin sesuai harapan masyarakat. Kepala Desa Maggenrang juga dianggap memiliki karakter dan kompetensi yang baik sehingga berdampak dalam proses pengambilan keputusan sebelum bertindak.

3. Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensi yang dimiliki seseorang Kepala Desa Maggenrang dan bersifat timbal balik. Sumber daya ini tergambar dalam bentuk pengenalan dan pengakuan dalam suatu kelompok sosial yang berbentuk dukungan kolektif. Nilai ikatan yang terjalin seorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat mereka mobilisasi dan volume modal (budaya, sosial dan ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Maggenrang, terkait pentingnya modal sosial bagi seorang Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Sangat penting. Seorang kepala desa harus memiliki modal sosial yang kuat karena kepercayaan masyarakat lahir dari hasil interaksi dua arah. Modal sosial yang Saya miliki juga merupakan suatu keyakinan dalam memantapkan diri mencalonkan Kepala Desa maggenrang” (Wawancara, NH; 07-04-2023)

Modal sosial merupakan salah satu modal yang menjadi tekad Kepala Desa Maggenrang untuk berani mencalonkan diri sebagai kandidat Kepala Desa Maggenrang. Dengan adanya modal sosial memungkinkan terjalinnya kerja sama dan membentuk kerukunan antara Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat. Pernyataan tersebut juga dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan Kepala

Dusun Desa Maggenrang, terkait modal sosial yang dimiliki Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa Maggenrang memiliki modal sosial yang sangat baik. Tergambar dari keaktifan beliau dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, baik kegiatan-kegiatan kecil maupun kegiatan-kegiatan besar.” (Wawancara, T; 08-04-2023)

Hal senada juga di ungkapkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh agama Desa Maggenrang, terkait hubungan sosial Kepala Desa Maggenrang dengan masyarakat adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa Maggenrang memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat karena sering membuat dan ikut serta dalam beberapa kegiatan bersama. Jauh sebelum terpilih, Kepala Desa Maggenrang memang selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.” (Wawancara, S; 08-04-2023)

Modal sosial terletak pada kemampuan Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Kerjasama yang terjadi dibangun berdasarkan atas kepercayaan yang didukung norma-norma dan nilai-nilai sosial. Sehubungan dengan wawancara peneliti dengan tokoh pemuda Desa Maggenrang, terkait bentuk modal sosial Kepala Desa Maggenrang di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa Maggenrang tergolong ramah dan humoris. Bantuk modal sosial beliau seperti rutin mengunjungi setiap dusun untuk bercengkrama dengan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh pemuda dalam kegiatan desa, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.” (Wawancara, NI, 09-04-2023)

Silaturahmi antara Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat hingga saat ini masih sangat terjaga. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut, Kepala Desa Maggenrang berupaya membangun pondasi modal sosial dengan kokoh dan

membentuk strategi dalam bentuk investasi baik pribadi ataupun kolektif guna mentransformasikan hubungan yang telah terbentuk. Hal ini tergambar dalam hubungan keakraban antara Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat sekitar. Hal yang sama juga dilontarkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Maggenrang, terkait tingkat keberhasilan modal sosial Kepala Desa Maggenrang di Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Sebelum beliau menjabat sebagai kepala desa, hubungan sosial antara masyarakat dengan kepala desa sebelumnya terkesan kurang hidup hingga banyak kegiatan-kegiatan desa yang terhambat. Namun, semenjak pemerintahan Desa Maggenrang telah terganti, kepala desa yang saat ini selalu berbaur dengan masyarakat.” (Wawancara, K; 11-04-2023)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Kepala Desa Maggenrang yang saat ini menjabat di gandrungi oleh kalangan masyarakat sebab pribadinya yang menyenangkan dan kepeduliannya tergolong tinggi sehingga terjalin rasa memiliki yang baik. Rasa memiliki atau *sense of belonging* penting dalam hubungan sosial sebab dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Memupuk hubungan yang baik dan terus terjalin dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama sebagai upaya untuk mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa terpenuhi akibat kurangnya modal pendukung. Dengan demikian, modal sosial berusaha menjabarkan proses individu dapat bekerjasama dengan individu lain.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik bagi Kepala Desa Maggenrang. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor,

dan sebagainya. Artinya modal simbolik berbentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional ataupun non-institusional. Simbolik memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, suatu partai politik, dan suatu bangsa. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Maggenrang, terkait pentingnya modal simbolik bagi Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Modal simbolik penting dalam dunia politik, tetapi kurang penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa.” (Wawancara, HN; 07-04-2023)

Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang meliputi pembuatan keputusan. Politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan partisipasi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Modal simbolik sangat penting dalam dunia politik sebab bersifat rasional, artinya dapat dengan bebas diubah menjadi keuntungan dan dimanfaatkan dalam lingkup sosial. Pernyataan tersebut juga dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Maggenrang, terkait peran modal simbolik bagi Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“kurang berperan karena masyarakat menilai Kepala Desa Maggenrang dari kinerjanya, bukan materinya.” (Wawancara T; 08-04-2023)

Masyarakat pada umumnya menilai seorang pemimpin berdasarkan apa yang dimiliki dan mampu dilakukan oleh seorang pemerintah. Namun, bagi Kepala Desa Maggenrang, hal demikian kurang penting karena tidak berpengaruh besar terhadap proses pelaksanaan pemerintahan desa. Sejalan dalam wawancara peneliti dengan tokoh agama Desa Maggenrang, terkait modal simbolik yang

dimiliki Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa Maggenrang tergolong hidup sederhana. Modal simbolik beliau yang paling menonjol hanya jabatan sebagai Kepala Desa Maggenrang.” (Wawancara, S; 07-04-2023)

Hal senada juga dilontarkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh pemuda Desa Maggenrang, terkait Kepala Desa Maggenrang yang kurang memiliki modal simbolik adalah sebagai berikut.

“Tidak jadi masalah. Modal simbolik dalam pemerintahan bukan kebutuhan masyarakat. Hal yang dibutuhkan masyarakat yakni cara bersikap, kebiasaan dan usaha Kepala Desa Maggenrang dalam memerintah.” (Wawancara, NI; 09-04-2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa modal simbolik bukan kebutuhan utama masyarakat Desa Maggenrang. Kepala Desa Maggenrang telah membuktikan bahwa meskipun beliau memiliki jabatan yang tinggi tetapi sangat memanfaatkan jabatannya dengan baik. Hal yang senada juga diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Maggenrang, terkait pengaruh modal simbolik terhadap kinerja Kepala Desa Maggenrang adalah sebagai berikut.

“Tidak. Pemerintah tidak perlu memiliki modal simbolik. Bagi masyarakat kesederhanaan Kepala Desa Maggenrang telah cukup membawa kesejahteraan dengan berbagai kreatifitas dalam memimpin.” (Wawancara, H; 10-04-2023)

Masyarakat Desa Maggenrang menilai seorang pemimpin bukan dari apa yang dimiliki tetapi apa yang mampu dilakukan untuk desa dan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Maggenrang, modal simbolik tidak memberikan jaminan kesejahteraan sehingga tidak tergolong sebagai hal yang *urgent*. Masyarakat memandang bahwa teladan yang dicerminkan oleh seorang kepala desa jauh lebih penting.

Kepala Desa Maggenrang saat ini termasuk sukses dalam mengelolah pemeritahan Desa Maggenrang. Meskipun tergolong kurang dalam modal simbolik tetapi beliau mampu jauh lebih berhasil dari kepala desa sebelum-sebelumnya. Kesuksesan tersebut diperoleh dari kerjasama yang terjalin antara aparat dan masyarakat sekitar.

Selain itu, masyarakat Desa Maggenrang berpendapat bahwa seorang kepala desa cukup memiliki sikap yang bijak, kebiasaan yang baik, kinerja yang tinggi dan kreativitas tanpa batas dalam memimpin dan memajukan Desa Maggenrang.

C. Pembahasan Penelitian

1. Modal Ekonomi

Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal ekonomi merupakan modal yang paling mudah dan dapat langsung ditukar dengan uang serta dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua macam modal ekonomi, yaitu uang yang berhubungan dengan media pertukaran dan hak kepemilikan yang berhubungan dengan barang modal fisik. Uang bukan modal dalam arti sebenarnya tetapi uang hanya merupakan sarana untuk dapat mengembangkan modal fisik dan modal manusia.

Modal ekonomi memiliki makna sebagai penggerak dan pelumas dalam mesin politik. Pada musim kampanye misalnya, kandidat membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhannya seperti biaya poster,

spanduk, membayar iklan, dan sebagainya. Demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat Kepala Desa Maggenrang.

Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa proses politik pilkada membutuhkan biaya atau ongkos yang sangat mahal. Hal demikian menyebabkan munculnya tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal sebab kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang atau modal yang besar.

Modal ekonomi tergolong sangat penting dalam dunia pemerintahan. Terkadang, terdapat juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan modal yang lebih sehingga kepala desa tetap harus bertanggungjawab meskipun hal tersebut merupakan kepentingan publik. Jika ekonomi seorang kepala desa buruk, maka dapat memunculkan perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang akibat ekonomi yang buruk adalah korupsi. Perilaku korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan tetapi memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Kepala Desa Maggenrang tergolong memiliki modal ekonomi yang stabil sehingga masyarakat tidak merasa khawatir. Selain itu, masyarakat berharap agar tupoksi Kepala Desa Maggenrang beserta aparatnya tetap dapat menjaga kepercayaannya.

2. Modal Kultural

Bourdieu (1926) mengungkapkan bahwa modal kultural merupakan representasi bentuk paling efektif dalam transmisi modal kultural yang dapat

dilihat melalui warisan karena sebagian besar hal tersebut tersembunyi dan dengan demikian kurang siap dikendalikan. Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti pengetahuan, keahlian, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi dan sebagainya.

Modal kultural tergolong penting tetapi tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam suatu pemerintahan. Kesuksesan suatu pemerintahan dapat ditinjau dari personal pemimpin itu sendiri. Artinya, walaupun pemerintah memiliki pendidikan yang tinggi dan wawasan yang hebat tetapi tidak manfaatkannya dengan baik maka hal demikian akan sia-sia. Sebaliknya, jika seorang pemimpin hanya memiliki pendidikan yang rendah dan wawasan yang terbatas tetapi memanfaatkan jabatannya dengan bijak dan membunmi maka semua masyarakat akan mengseganinya. Demikian dengan Kepala Desa Maggenrang, meskipun beliau hanya lulusan SMA tetapi beliau mampu memimpin Desa Maggenrang dengan sangat baik.

Kepala Desa Maggenrang dianggap telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kepala Desa Maggenrang di pandang memiliki pola kepemimpinan yang bijak dan penampilan yang berkhariisma serta berwibawa sehingga dihormati dan penuh daya tarik.

Bagi masyarakat Desa Maggenrang, karakter dan kompetensi Kepala Desa Maggenrang jauh lebih penting sebab berdampak pada proses pengambilan keputusan strategik dan tolok ukur kesejahteraan. Dengan demikian, Kepala Desa Maggenrang dan aparatnya dapat lebih bijak dalam bertindak.

Modal kultur Kepala Desa Maggenrang masuk dalam kategori *embodied state*. Menurut Bourdieu (1926), bahwa *embodied state* adalah bentuk fisik dari suatu kultur yang melekat pada tubuh manusia dan secara keseluruhan menyatu dengan manusia sebagai satu kesatuan. Bentuk dari *embodied state* dapat berupa pola hidup, cara berbicara, cara berbusana dan kecenderungan-kecenderungan lain yang melekat pada individu sebagai pelaku sosial

3. Modal Sosial

Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual, atau maya yang terdapat pada seseorang atau kelompok karena memiliki jaringan berupa timbal balik perkenalan dan pengakuan serta sedikit banyak terinstitusionalisasikan.

Kepala Desa Maggenrang memiliki modal sosial yang baik. Hal tersebut menjadi tekad beliau untuk berani mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Maggenrang. Hubungan sosial antara Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat sudah tergolong dekat, tergambar dari keterlibatannya membuat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan jauh sebelum menjadi kepala desa, beliau telah turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama.

Hasbullah (2006), mengungkapkan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang

positif dan kuat.

Silaturahmi antara Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat hingga saat ini masih sangat terjaga. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut, Kepala Desa Maggenrang berupaya membangun pondasi modal sosial dengan kokoh dan membentuk strategi dalam bentuk investasi baik pribadi ataupun kolektif guna mentransformasikan hubungan yang telah terbentuk. Kepala Desa Maggenrang juga tidak sungkan mengajak rakyatnya untuk bercanda gurau bersama. Selain itu, Kepala Desa Maggenrang memiliki pribadi yang menyenangkan dan kepedulian yang tinggi dibandingkan kepala desa sebelumnya.

4. Modal Simbolik

Bourdieu (1926), mengungkapkan bahwa model simbolik merupakan pengamplikasian simbol-simbol tertentu untuk meligitimasi pemilikan berbagai modal simbolik yang meliputi modal ekonomi, modal kultural dan modal sosial. Bourdieu juga mengatakan bahwa hubungan dan perpindahan kondisi sosial lebih kompleks daripada sekadar modal ekonomi, tetapi lebih berfungsi sebagai modal simbolik.

Modal simbolik merupakan bentuk pengakuan dari kelompok, baik secara institusional ataupun non- institusional. Simbolik mampu menggiring orang lain untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang.

Kepala Desa Maggenrang menganggap bahwa modal simbolik tergolong penting dalam dunia politik, tetapi kurang penting dalam dunia pemerintahan. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam

masyarakat yang meliputi pembuatan keputusan. Politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan partisipasi terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Masyarakat Desa Maggenrang menilai seorang pemimpin bukan dari apa yang dimiliki tetapi apa yang mampu dilakukan untuk desa dan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Maggenrang, modal simbolik tidak memberikan jaminan kesejahteraan sehingga tidak tergolong sebagai hal yang penting. Masyarakat memandang bahwa teladan yang dicerminkan oleh seorang kepala desa jauh lebih penting.

Selain itu, Kepala Desa Maggenrang memiliki sikap yang bijak, kebiasaan yang baik dan kinerja serta kreativitas yang tinggi dalam memimpin. Kepala Desa Maggenrang saat ini termasuk sukses dalam mengelolah pemerintahan Desa Maggenrang. Meskipun tergolong kurang dalam modal simbolik tetapi beliau mampu jauh lebih berhasil dari kepala desa sebelum-sebelumnya. Kesuksesan tersebut diperoleh dari kerjasama yang terjalin antara aparat dan masyarakat sekitar.

5. Dampak Jaringan Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan serangkaian politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tetapi berada pada pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dimiliki kepada orang lain yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Terbentuknya politik dinasti disuatu daerah seharusnya dihilangkan sebab politik dinasti merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada sistem politik yang ada,

terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya.

Berdasarkan penelitian menggunakan indikator dari Bourdieu (1926) yang meliputi modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik ditemukan bahwa politik dinasti lahir dari modal-modal tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa Kepala Desa Maggenrang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa sebelumnya sehingga menjadi salah satu alasan beliau melanjutkan tongkat estafet pemerintahan selanjutnya. Hal ini tentu tergolong dalam politik dinasti.

Keluarga politik atau politik dinasti merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Artinya, sistem pemerintahan di Desa Maggenrang masih mirip dengan pergantian pemerintahan dalam kerajaan sebab kekuasaan diwariskan kepada keluarga selanjutnya guna menjaga kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarganya. Pemerintahan demikian di Desa Maggenrang telah berlangsung sejak 20 tahun lalu.

Dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik di Desa Maggenrang yakni pembatasan kesempatan bagi orang lain untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Maggenrang. Hal demikian tentu tidak adil dan meredupkan karakter serta kompetensi yang layak dalam menduduki jabatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang diperoleh terkait pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, disimpulkan bahwa: 1) Modal Ekonomi: Kepala Desa Maggenrang memiliki modal ekonomi yang stabil, namun memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa sebelumnya sehingga tergolong dalam politik dinasti, 2) Modal Kultural: Karakter dan kompetensi Kepala Desa Maggenrang jauh lebih penting sebab berdampak pada proses pengambilan keputusan dan tolok ukur dalam bertindak, 3) Modal Sosial: Kepala Desa Maggenrang memiliki modal sosial yang baik, nampak pada peran beliau dalam membuat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dan 4) Modal Simbolik: Kepala Desa Maggenrang memiliki modal simbolik yang tergolong kurang tetapi beliau mampu mensejahterakan rakyatnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik di Desa Maggenrang yakni pembatasan kesempatan bagi orang lain yang lebih layak untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Maggenrang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, saran terkait penelitian ini yaitu Peran Badan Pengawasan Desa (BPD) hendaknya lebih di perketat sebab lemahnya lembaga pengawasa berdampak pada peningkatan kasus politik dinasti.

Hal demikian yang terjadi pada Desa Maggerang yang mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dengan melibatkan hubungan keluarga secara turun-temurun sebagai estafek kekuasaan sehingga tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menduduki jabatan yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin,Indar, *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*, Makassar : IKP (Ikatan Penerbit Indonesia, 2010).
- Budiarjo,Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan,*Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Casey, Family Matters : *The Prevalence and Effect of political Families in National Politics*, Desertasi University of Missouri, 2009.
- Chris Wilkes (ed), (*Habitus x modal*)+ *Ranah = Praktik*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Fashri,Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieau*, Yogyakarta: Juxtapose, 2007.
- Field,John*Terj. Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- Habiba, Klanisasi Politik Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H.Andi Masdar), *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, danPolitik, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Halim, Abd. *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*, Yogyakarta: LP2B, 2014.
- Haryanto, *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta : Polgom, 2014.
- Hess,Stephen,*America"s political Dynasties*, seperti yang dikutip dalam M Kurtz, *Introduction : The Family in Politics in the American Family* Universitas Press of America, 1993.
- Hidayati, Nur, Politik dinasti dan Demokrasi Politeknik Negeri Semarang, *Jurnal Politik*, Vol.1 No. 1, 2014.
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- _____. *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar*. Makassar : Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2012.

- Kadir, Harun dkk. *Pra Sejarah di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Proyek Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan, 1976.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat, 1974.
- _____, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta :Rineka Cipta, 2009. Kosals, L., *Essay on Clan Capitalism in Rusia*, Yogyakarta : Acta Oeconomica, 2007.
- Kurtz,Donn M, *The Political Family : A Contemporary view, dalam Sociological perspective*, Lousiana : University of Sout Western 1989.
- Mahendra,Akbar, Budaya Politik Patrimonialisme dalam pemilihan kepala Daerah di kabupaten Jeneponto, *Skripsi*, Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Mattuladda, *Bugis Makassar: Manusia dan Kebudayaan*, Makassar: Berita Antropologi No. 16 Fakultas Sastra UNHAS, 1974.
- Moloeng, Lexy,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mukhlis. Kathryn May Robinson, *Agama dan Realitas Sosial*, Lembaga Penerbitan: Universitas Hasanuddin, 1985.
- Nurcholis, Ahmad, Orang kuat dalam dinamika Politik lokal studi kasus kekuasaan politik Fuad Amin di bangkalan, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005Pasal 53, Ketentuan tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah atau Kota.
- Purwaningsih, Titin,Politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era Reformasi (studi tentang rekrutmen politik pada partai Golkar, partai Amanat nasional dan partai Demokrat Sulawesi Selatan tahun 2009), *Skripsi*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.
- Ritzer dan Goodman,*Teori Sosiologi Klasik – Post Modern*.
- Soekanto,Soerjono,*Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*.

Suyadi, Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Varma, Sp., *Teori Politik Modern*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Walinono, Hasan, *Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik*, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1979.

Zuhro, R. Siti dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan Nilai- Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul Skripsi



131

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Andi Ahmar Ihwal Ikhsan
2. Nomor Pokok : 105641101818
3. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
4. Alamat : Kota Makassar
5. Rencana Judul :
"Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa di Desa Mangerang Kabupaten Bone".

6. Rencana Konsultan
Konsultan I : Hamrun, SIP, M.Si
Konsultan II : Hardianto Hawing, ST, MA

Makassar, 21 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Pemohon,

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 120 7163

Andi Ahmar Ihwal Ikhsan
NIM. 105641101818

Lampiran 2 Pembimbing Penulisan Skripsi

 **Universitas Muhammadiyah Makassar**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menyempurna Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 239 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 863 308
Official Email: info@unismuh.ac.id
Official Web: <https://unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
No : 0131/A.3-II/I/1444/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar mengumumkan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : andi Ahmar Ikhwal Ikhwan
S t a m b u k : 105641101818
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi
"Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa di Desa Mangerang Kabupaten Bone"

Pembimbing I : Hamdan, S.IP, M.Si
Pembimbing II : Hardianto Hawing, ST, MA

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, di serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 21 Januari 2023
D e k a n.


Dr. Hj. Ikhwan Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Kemampuan Kerja Bangsa dan Universal Manpower - Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp. 066972 Fax (0411) 865386 Makassar 90221 e-mail: lp3m@uimuh.ac.id

Nomor : 1025/05/C.4-VIII/III/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 Sya'ban 1444 H
20 March 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0480/FSP/A.I-VIII/III/1444H/2023M tanggal 20 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI AHMAR IHWAL IKHSAN**
No. Stambuk : **10564 1101818**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA DESA DI DESA MANGGENRANG KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Maret 2023 s/d 28 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Nur Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

03-23

Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian



Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Makassar


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sultselprov.go.id> Email : ptsp@sultselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 13788/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.	Bupati Bone
Lampiran	:		
Perihal	: <u>izin penelitian</u>		

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1025/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDI AHMAR IHWAL IKHSAN
Nomor Pokok	: 105641101818
Program Studi	: Ilmu pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

" POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA BESA DI DESA MAGGENRANG KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. **28 Maret s/d 28 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tambahan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Peringgal.

Lampiran 6 Surat Persetujuan Melaksanakan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.383/III/IP/DPMTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	ANDI AHMAR IHWAL IKHSAN
NIP/Nim/Nomor Pokok	105941101818
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Kel. Palattae Kec. Kahu
Pekerjaan	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
**"POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA DESA DI DESA MAGGENRANG
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE"**

Lamanya Penelitian : 28 Maret 2023 s/d 28 Mei 2023
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini dibenkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 27 Maret 2023
KEPALA DINAS,

DR. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda
: 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Kahu Kab. Bone di Palattae.
4. Kepala Desa Maggenrang Kab. Bone di Maggenrang.
5. Arsip.




Lampiran 7 Daftar Informan

INFORMAN

Nama Informan	Jabatan
1. H Nurdin	Kepala Desa
2. Tolleng	Kepala Dusun
3. Siri	Tokoh Agama
4. Nurul Irfan	Tokoh Pemuda
5. Hariadi, Masnurang, dan Karman	Tokoh Masyarakat



Lampiran 8 plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Ahwar Ihwal Ikhsan

NIM : 105641101818

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah, S.Hum., M.I.P.

NBM. 964 591

BAB I andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818 by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jul-2023 07:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2126203779

File name: BAB_I.docx (18.73K)

Word count: 1071

Character count: 7385

BAB I andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
4	theblaemblaem.com Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

On

Exclude bibliography

On



BAB II andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jul-2023 07:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2126203904

File name: BAB_II.docx (149.72K)

Word count: 3085

Character count: 20717

BAB II andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

ORIGINALITY REPORT

6%	4%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	Amirotun Sholikhah. "PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970 Publication	2%
3	dosensosiologi.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
5	id.scribd.com Internet Source	<1%
6	www.dpr.go.id Internet Source	<1%
7	www.slideshare.net Internet Source	<1%



8 ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

<1%

9 www.scribd.com
Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



BAB III andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818 by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jul-2023 07:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2126204018

File name: BAB_III.docx (150.28K)

Word count: 976

Character count: 6653

BAB III andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
6	es.scribd.com Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

BAB IV andi ahmar ihwal ikhsan

- 105641101818

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jul-2023 07:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2126204149

File name: BAB_IV.docx (128.58K)

Word count: 5071

Character count: 34343

BAB IV andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

ORIGINALITY REPORT

5%	3%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
4	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
5	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
6	yuniarnasir.wordpress.com Internet Source	<1%
7	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<1%
8	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
9	eprints.unm.ac.id	

	Internet Source	<1 %
10	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
11	mulpix.com Internet Source	<1 %
12	Zainuddin Wirabuana, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Andress Deny Bakarbessy. "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan", MATAKAO Corruption Law Review, 2023 Publication	<1 %
13	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB V andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

by Tahap Tutup

Submission date: 04-Jul-2023 07:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2126204255

File name: BAB_V.docx (15.65K)

Word count: 395

Character count: 2435

BAB V andi ahmar ihwal ikhsan - 105641101818

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.usd.ac.id

Internet Source



2%



Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



Lampiran 9 Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak H. Nurdin selaku Kepala Desa Maggenrang



Gambar 3. Foto bersama Bapak Tolleng selaku tokoh agama Desa Maggenrang



Gambar 4. Foto Bersama Bapak Masnurang selaku tokoh masyarakat Desa Maggenrang



Gambar 5. Foto bersama Nurul Irfan selaku tokoh pemuda Desa Maggenrang

RIWAYAT HIDUP



ANDI AHMAR IHWAL IKHSAN, lahir di Palatttae 13 Desember 1998. Peneliti merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan Andi Hamzah dan Rosnawati A. Sahib. Peneliti memulai pendidikan formal pada tahun 2005 di SD 277 Palatttae. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar, Peneliti melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kahu pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Bone pada tahun 2014. Setelah lulus pada tahun 2017, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengalaman organisasi peneliti yakni sebagai anggota pada DPK KEPMI BONE (Taro Ada Taro Gau) Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai anggota pada Ikatan Pelajar Mahasiswa Kahu (IPMK).